

DOMINASI OLIGARKI DAN POLITIK DINASTI DALAM KANDIDASI KEPALA DAERAH OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Oktavia Deta Riawan*, Fitriyah, Wijayanto

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

**corresponding author, e-mail : oktaviadeta1722@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dominasi oligarki dan politik dinasti dalam proses kandidasi Pilkada Kota Surakarta 2020 oleh PDI Perjuangan. Meskipun Achmad Purnomo terpilih secara *bottom-up* di tingkat kota, Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang politik dinasti dipilih sebagai calon final melalui mekanisme tertutup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan dalam PDI Perjuangan, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memungkinkan dominasi oligarki dan politik patronase. Dukungan terhadap pencalonan Gibran dinilai sebagai bentuk balas budi atas kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kesimpulannya, proses kandidasi yang sentralistik dan tertutup memperkuat pengaruh oligarki dan politik dinasti dalam pengambilan keputusan partai. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mekanisme kandidasi partai politik agar lebih transparan dan demokratis.

Kata Kunci: Oligarki, Patronase, PDI Perjuangan, Pilkada Surakarta, Politik Dinasti.

Abstract

[Title: The Domination of Oligarchy and Dynastic Politics in the Mayoral Candidacy by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in Indonesia in 2020] This study analyzes the dominance of oligarchy and dynastic politics in the mayoral candidacy process during the 2020 Surakarta City Election by PDI Perjuangan. Although Achmad Purnomo was selected through a bottom-up process at the city level, Gibran Rakabuming Raka, with a background in dynastic politics, was ultimately chosen as the final candidate through a closed mechanism. This research employed a qualitative approach with a critical paradigm, collecting data through in-depth interviews and documentation studies. The findings reveal that power centralization within PDI Perjuangan, led by Megawati Soekarnoputri, enabled the dominance of oligarchy and political patronage. Support for Gibran's candidacy was seen as a form of reciprocal favor for Joko Widodo's victories in the 2014 and 2019 presidential elections. In conclusion, the centralized and closed candidacy process reinforced the influence of oligarchy and dynastic politics in the party's decision-making. This study recommends reforms in political party candidacy mechanisms to be more transparent and democratic.

Keywords: Oligarchy, Patronage, PDI Perjuangan, Dynastic Politics, Surakarta Mayoral Election.

Pendahuluan

Oligarki dan politik dinasti terus menjadi fenomena dominan dalam politik Indonesia, meskipun negara ini telah melewati berbagai fase reformasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif seperti halnya dengan melakukan transisi politik, seperti desentralisasi kekuasaan dan pemilihan umum yang lebih terbuka. Era Reformasi yang seharusnya mengakhiri otoritarianisme, nyatanya masih menghadapi dominasi oleh sekelompok elite yang memiliki kekuatan besar. Hal ini terjadi karena oligarki ciptaan orde baru yang pada awalnya bergantung pada Suharto, berhasil beradaptasi dengan memanfaatkan partai politik untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Mereka mampu memanfaatkan kekayaan dan koneksi untuk memengaruhi partai, media, dan proses pemilihan demi menjaga kekuasaan di tangan segelintir elit.

Kebutuhan oligarki dalam menguasai partai politik pada hakikatnya adalah terkait dengan kapasitas yang dimiliki partai dalam menyediakan kandidat dalam pemilihan umum yang kelak akan berada di kursi pemerintahan dan berwenang dalam membuat kebijakan publik dimana kehidupan oligarki ini dipengaruhi dari arah kebijakan itu.

Dalam konteks Pilkada, oligarki lokal dan nasional sering kali bekerja sama untuk menentukan hasil pemilihan. Partai politik menjadi kendaraan utama bagi oligarki untuk mencalonkan kandidat yang menguntungkan kepentingan mereka. Dalam banyak kasus, politik dinasti muncul sebagai salah satu manifestasi dari oligarki ini, di mana keluarga dan hubungan kekerabatan memainkan peran besar dalam pencalonan.

Kasus Pilkada Surakarta tahun 2020 memberikan contoh nyata dari fenomena ini, ketika Gibran Rakabuming Raka, yang berlatar belakang dinasti, berhasil memenangkan pencalonan dari PDI Perjuangan, menggantikan Achmad Purnomo, kader partai yang sudah lama berkiprah dalam politik lokal. Sosok Joko Widodo dikaitkan dengan hal ini karena usahanya dalam melakukan lobby politik kepada ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta untuk menerima pendaftaran. Meskin lobby politik ini pada akhirnya mendapat penolakan dengan kuatnya pendirian masyarakat Kota Surakarta khususnya PDI Perjuangan untuk mengusung Achmad Purnomo.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana oligarki dan politik dinasti telah mengganggu integritas partai politik, khususnya dalam proses rekrutmen dan kandidasi kepala daerah. Penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya transparansi dalam kandidasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Kajian Pustaka

Oligarki merujuk pada kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil elit dengan pengaruh besar dalam pemerintahan, sering terkait dengan kekayaan, keluarga, dan politik. Jeffrey A. Winters mengembangkan teori yang menyoroiti bahwa oligarki berpusat pada kemampuan elit untuk melindungi kekayaan mereka, yang diukur dengan *Material Power Index* (MPI). Oligarki memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan dan menggunakan kekuasaan politik untuk melindungi dan memperluas kekayaan mereka. Hubungan patron-klien juga mencirikan interaksi antara oligarki dan partai politik, di mana oligarki (patron) memberi dukungan kepada politisi (klien) yang kemudian berhutang budi.

Politik dinasti adalah bentuk oligarki di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Politik dinasti seperti yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah praktik kekuasaan yang diwariskan di dalam keluarga, dimana anggota keluarga memegang peran strategis dalam pemerintahan atau partai. Keluarga ini membatasi akses ke posisi kekuasaan

hanya bagi keluarga tersebut, dengan menggunakan patronase untuk memperkuat jaringan loyalitas dan menjaga kekuasaan. Pengaruh keluarga dalam pencalonan anggota baru memperkuat popularitas dan patronase yang telah dibangun sebelumnya. Dalam sistem politik Indonesia, politik dinasti sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah, terutama setelah penghapusan larangan dinasti politik oleh MK pada 2015.

Rekrutmen politik merujuk pada proses di mana individu dipilih untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai kandidat maupun pemimpin partai. Menurut Pippa Norris, rekrutmen politik dapat bersifat terbuka atau tertutup. Rekrutmen terbuka melibatkan partisipasi yang luas dari anggota partai atau eksternal, sementara sistem tertutup hanya melibatkan elit partai. Proses rekrutmen mencakup seleksi, verifikasi administratif, uji kelayakan, dan penetapan calon, untuk memastikan kandidat memiliki kapasitas dan integritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi, termasuk

analisis kebijakan dan pemberitaan media terkait dinamika Pilkada Kota Surakarta 2020 terkhusus mengenai kebijakan kandidasi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan. Fokus penelitian ini adalah pada proses pengambilan keputusan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh PDI Perjuangan.

Hasil dan Analisis

Penelitian ini mengungkap adanya dominasi oligarki dan politik dinasti dalam proses pencalonan kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Pilkada Kota Surakarta 2020. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen di tingkat lokal, meskipun dilakukan secara *bottom-up*, tidak mampu menandingi keputusan final yang sangat sentralistik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Kandidasi Achmad Purnomo, yang merupakan kader internal dengan pengalaman politik lokal yang kuat, diabaikan oleh DPP. Sebaliknya, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang belum memiliki pengalaman politik, dipilih sebagai kandidat final dalam pencalonan Wali Kota Surakarta melalui mekanisme tertutup.

PDI Perjuangan menjalankan kaderisasi berjenjang melalui sekolah partai dan kaderisasi pratama, madya, hingga utama sesuai Anggaran Dasar Partai. Namun, dalam implementasinya, proses kaderisasi

tidak selalu menjadi syarat utama dalam pencalonan kepala daerah. Sejak 2014, PDI Perjuangan beralih menggunakan sistem rekrutmen terbuka yang memungkinkan kader internal maupun eksternal untuk mencalonkan diri. Sistem ini terlihat dalam proses rekrutmen Pilkada Kota Surakarta 2020, di mana partai membuka peluang bagi dua kandidat, yaitu Achmad Purnomo yang melalui jalur DPC dan Gibran Rakabuming Raka yang mendaftar melalui DPD.

Di tingkat DPC Surakarta, proses rekrutmen dimulai dengan penjarangan aspirasi dari tingkat anak ranting hingga DPC. Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa muncul sebagai kandidat terpilih melalui mekanisme *bottom-up* ini. Namun, pada akhirnya, DPP PDI Perjuangan memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota berdasarkan hak prerogatif ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri. Keputusan ini bersifat mutlak dan harus dijalankan meskipun menimbulkan kekecewaan di tingkat DPC Surakarta.

PDI Perjuangan berhasil memenangkan pasangan Gibran-Teguh dengan perolehan suara 86,5% pada Pilkada 2020, meskipun proses rekrutmen di tingkat pusat tidak transparan, karena alasan pencalonan Gibran tidak dijelaskan kepada DPC.

Dominasi oligarki dalam proses kandidasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada Pilkada Surakarta 2020 mengangkat kembali persoalan struktural dalam demokrasi lokal Indonesia. Kandidasi Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, menunjukkan bahwa kekuatan oligarki dalam politik Indonesia tidak hanya bergerak di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau ranah lokal. Proses politik di Surakarta, yang menjadi sorotan karena status politik ayahnya, mengindikasikan bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada lingkaran elite yang terbatas, mempersempit ruang kompetisi yang sehat dan demokratis.

Salah satu aspek yang menonjol dari dominasi oligarki ini adalah kecepatan dan kemudahan dengan mana Gibran dapat mengamankan tiket pencalonan dari PDI-P, partai yang selama ini sangat dominan di Surakarta. Padahal, Gibran tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya dan masih tergolong "pendatang baru" di arena politik. Namun, dukungan penuh dari elite partai dan berbagai jaringan kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, memungkinkan Gibran mengalahkan Achmad Purnomo, calon yang lebih berpengalaman dan semula dipersiapkan oleh partai.

Menurut wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, proses awal pemilihan

Achmad Purnomo memang berlangsung demokratis di tingkat cabang. Namun, keputusan DPP untuk mengusung Gibran tanpa mempertimbangkan hasil di tingkat cabang mencerminkan dominasi oligarki dalam partai tersebut.

Keputusan PDI-P untuk mendukung Gibran bukan hanya pertarungan dalam konteks internal partai, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika oligarki yang lebih luas. Ada kecenderungan dalam politik lokal di Indonesia di mana keluarga atau tokoh yang memiliki akses langsung ke kekuasaan pusat lebih diuntungkan dibandingkan kandidat yang muncul dari akar rumput atau yang didukung berdasarkan meritokrasi. Dengan kata lain, relasi politik antar elite di pusat dalam hal ini Joko Widodo sebagai Presiden dan sebagai tokoh kunci di PDI Perjuangan menjadi faktor penentu dalam keputusan politik di tingkat lokal.

Pengaruh oligarki dalam proses kandidasi Gibran juga tercermin dalam respons publik dan media. Meskipun ada kritik, baik dari masyarakat maupun beberapa tokoh politik, terhadap potensi politik dinasti yang diwakili oleh pencalonan Gibran, kritik ini tidak memiliki dampak signifikan. Media arus utama cenderung mengamplifikasi citra positif Gibran sebagai "pemimpin muda" yang membawa "gagasan baru", tanpa menggali lebih dalam tentang

dampak dari politik dinasti yang dikhawatirkan akan merusak mekanisme demokrasi lokal. Media yang dikendalikan oleh oligarki cenderung mengabaikan narasi kritis, sehingga memperkuat status quo.

Lebih jauh lagi, kasus Gibran menunjukkan bahwa dominasi oligarki dalam politik lokal bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga budaya politik. Di Indonesia, jaringan patronase dan loyalitas politik masih sangat kuat, di mana keputusan-keputusan penting sering kali ditentukan oleh pertimbangan kekeluargaan, kesetiaan politik, dan kepentingan ekonomi, bukan oleh pertimbangan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam konteks ini, pencalonan Gibran adalah manifestasi dari sistem yang memungkinkan elite politik untuk mereproduksi kekuasaan melalui keluarga mereka.

Secara keseluruhan, pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Surakarta 2020 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dominasi oligarki terus mempertahankan dirinya dalam politik lokal di Indonesia. Proses kandidasi ini juga berkelanjutan ke dalam praktik politik dinasti.

Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Joko Widodo, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta untuk periode

2020-2024 melalui PDI Perjuangan. Proses ini diawali dengan penolakan dari DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yang telah menyelesaikan penjaringan internal, namun akhirnya Gibran berhasil maju melalui pendaftaran di tingkat DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Keputusan Megawati Soekarnoputri untuk mendukung Gibran meskipun DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta telah merekomendasikan Achmad Purnomo mencerminkan kuatnya pengaruh Presiden Joko Widodo dalam pencalonan ini.

Pengaruh Jokowi terlihat melalui dua mekanisme: suara loyal dari konstituen yang mempercayai keluarga Jokowi dan koneksi politik yang dimanfaatkan Gibran. Dukungan kuat dari berbagai partai koalisi seperti Gerindra, PAN, PSI, PKB, dan Golkar, serta popularitas keluarganya, membuat Gibran unggul dalam pertarungan politik. Meskipun Gibran tidak pernah secara eksplisit menolak atau menentang keterlibatan keluarganya, popularitas Jokowi jelas berkontribusi besar pada kemenangan Gibran di Pilkada.

Keterlibatan Joko Widodo dalam pencalonan Gibran terlihat jelas dari dukungan implisit yang diterima Gibran berkat nama besar ayahnya. Kepopuleran Jokowi di Surakarta menjadi modal besar bagi Gibran, yang oleh banyak pihak dinilai menerima keuntungan dari posisi istimewa

ini. Selain itu, loyalitas konstituen PDI Perjuangan kepada Jokowi dan hubungan patronase di dalam partai mengukuhkan dukungan kepada Gibran, meskipun DPC Kota Surakarta telah merekomendasikan calon lain.

Dominasi politik dinasti dalam pencalonan Gibran sangat kentara. Gibran dianggap mendapat dukungan karena statusnya sebagai anak Presiden, dan beberapa wawancara dengan tokoh politik lokal, seperti Fx. Hadi Rudyatmo dan YF Sukasno, mengonfirmasi bahwa status Gibran sebagai anak Jokowi menjadi faktor utama dalam pencalonannya. Meskipun tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya, pengaruh keluarga Jokowi membuat Gibran berhasil menempati posisi penting di panggung politik.

Dominasi oligarki dan politik dinasti dalam pencalonan Gibran menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen partai belum sepenuhnya transparan dan demokratis. Meskipun PDI Perjuangan memiliki sistem kaderisasi yang berjenjang dan prosedur rekrutmen formal, keputusan akhir tetap berada di tangan elit partai di tingkat pusat. Situasi ini menimbulkan kompetisi yang tidak adil bagi kandidat lain, seperti Achmad Purnomo, yang tersisih meskipun mendapatkan dukungan kuat dari tingkat lokal.

Patronase politik ini tidak hanya merusak proses demokrasi internal partai, tetapi juga memperlihatkan bahwa partai politik besar di Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elit. Reformasi mendesak diperlukan agar partai-partai politik di Indonesia dapat berfungsi sebagai institusi demokratis yang lebih transparan dan akuntabel.

Kemenangan Gibran dalam Pilkada Surakarta dengan persentase suara 86,5% dari total suara sah mencerminkan efektivitas dukungan dari PDI Perjuangan dan jaringan politik dinasti yang menguntungkan dirinya. Meskipun ada kandidat independen seperti Bagyo Wahyono, mereka tidak mampu menandingi dominasi politik dinasti dan patronase yang dimiliki Gibran.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan tidak menjalankan proses kandidasi kepala daerah Kota Surakarta tahun 2020 secara adil dan transparan. Kandidasi Gibran Rakabuming Raka ditetapkan melalui keputusan sentralistik oleh ketua umum, Megawati Soekarnoputri, yang mendominasi proses seleksi. Meskipun PDI Perjuangan mengklaim memiliki prosedur selektoral bottom-up, kenyataannya kandidasi Gibran lebih dipengaruhi oleh hubungan patronase

antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo, ayah Gibran. Aspirasi kader di tingkat lokal, yang lebih memilih Achmad Purnomo, diabaikan. Hal ini mencerminkan bentuk dominasi oligarki di mana kekuasaan sentral sepenuhnya berada di tangan elit partai.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya dominasi politik dinasti dalam kandidasi Gibran, di mana peran Joko Widodo sebagai patron politik nasional berperan besar dalam proses pencalonan. Popularitas dan pengaruhnya secara langsung mempengaruhi keputusan partai, menunjukkan bahwa politik dinasti masih menjadi fenomena yang kuat dalam partai. Intervensi dinasti politik ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga memberikan keuntungan tidak adil bagi kandidat, sementara aspirasi dan kepentingan anggota partai lainnya diabaikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih kritis terhadap latar belakang kandidat dalam proses kandidasi politik. Pemerintah juga diharapkan dapat mengkaji kembali undang-undang yang melarang praktik politik dinasti untuk menjaga kesetaraan kesempatan dalam politik. Partai politik, khususnya PDI Perjuangan, perlu melakukan reformasi internal agar proses seleksi lebih demokratis, transparan, dan mewakili aspirasi publik. Selain itu,

penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dominasi oligarki dan politik dinasti di tingkat yang lebih luas, baik di level DPD maupun DPP, guna mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang fenomena ini.

Daftar Pustaka

- Fitriyah. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pilkada.
- Hadiz, V. (2017). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti.
- Pippa Norris. (2006). Recruitment, Elections and Democracy. Cambridge University Press.
- Saputro, H. et al. (2023). Pola Rekrutmen PDI Perjuangan dalam Pilkada.
- Winters, J.A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.